

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, baik di dunia usaha, perbankan, pemerintahan maupun masyarakat menjadi semakin kompleks sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu. Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang memegang peranan penting khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi (www.kompasiana.com).

Setiap entitas pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan selama satu periode. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk tercapainya tujuan negara tersebut, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan mandat konstitusi tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, transparan,

dan akuntabel (*good goverment*) (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI UU No. 15 Tahun 2006).

Beberapa aspek yang mendukung terciptanya *good goverment*, adalah pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2005:189). Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif yaitu masyarakat dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan yang ditetapkan dilaksanakan sesuai aturan sehingga tujuan dapat tercapai. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen untuk memeriksa hasil kinerja pemerintah apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak (Suharti, dkk., 2017).

Salah satu lembaga yang bertugas dalam pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjadi bebas korupsi adalah BPKP. BPKP adalah lembaga pemerintah nonkementerian indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang dipercayakan berdiri paling depan sebelum KPK bertindak, harus lebih menjaga kualitas hasil auditnya dan selalu independen dalam mengaudit agar kasus-kasus tersebut tidak mudah terjadi lagi (Suharti, dkk., 2017).

BPKP merupakan auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKP perlu didukung oleh kualitas audit yang optimal yang dimana audit sebagai pemeriksaan pembukuan (keuangan dan administrasi) atau suatu proses tindakan sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002:9-11).

Dalam melaksanakan penugasan audit, auditor BPKP dituntut untuk bersikap profesionalisme dan berintegritas. Disamping itu auditor dituntut untuk melaksanakan prosedur audit yang telah dirancang agar tidak terjadi kegagalan audit. Untuk menghindari adanya kegagalan audit diperlukan kualitas audit yang baik agar dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien, dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar audit dan kode etik akuntan publik yang relevan (Arisinta, 2013).

BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya dibantu 34 kantor perwakilan BPKP di seluruh Indonesia. Disamping itu, guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPKP memiliki tenaga Sumber Daya

Manusia (SDM) yang berjumlah 6.281 orang , 97% diantaranya merupakan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) (www.bpkp.go.id).

Sebagai contoh, kasus yang terjadi adalah kualitas audit Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akibat adanya audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait bantuan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kasus pengadaan buku SD, SMP, dan SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2004 dan 2005. Hal ini menimbulkan gugatan atas kualitas hasil audit terjadi di perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Widodo, dkk., 2016).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya yaitu pengalaman kerja, profesionalisme, integritas, independensi dan *time budget pressure*. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih profesional dalam pelaksanaan kegiatan audit (Hidayat, dkk, 2014). Penelitian yang dilakukan Hidayat, dkk (2014) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor yang berpengalaman kerja akan membuat *judgement* yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas profesionalnya, dari pada auditor yang kurang memiliki pengalaman kerja. Penelitian ini didukung oleh Nurhayati (2015) bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini tidak konsisten dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Suharti dkk. (2017) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas audit adalah profesionalisme. Menurut Badjuri (2011) profesionalisme auditor merupakan sikap auditor yang melaksanakan audit berpedoman pada standar yang berlaku. Profesionalisme merupakan sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo, dkk (2015) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Suharti, dkk (2017) bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun, hal ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elen dan Sari (2013) bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah integritas. Penelitian yang dilakukan oleh Elen dan Sari (2013) menyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hidayat, dkk (2014) bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan Purnomo (2017) bahwa integritas tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Independensi auditor menjadi faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Arisinta (2013) bahwa independensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Pengaruh yang ditimbulkan adalah

positif, yaitu semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor maka akan semakin tinggi pula tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Febriansyah, dkk (2014) yang menyatakan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachruddin dan Handayani (2017) bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Time budget pressure merupakan faktor kelima yang memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Arisinta (2013) bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Tekanan *time budget* dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan prosedur audit. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2015) yang menyatakan *time budget pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian oleh Widodo (2016) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas hasil audit. Perubahan faktor terkait *time budget pressure* tidak akan memengaruhi kualitas hasil audit dari suatu penugasan.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit menunjukkan hasil yang berbeda, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas audit. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian oleh Suharti, dkk (2017) tentang pengaruh pengalaman kerja, profesionalisme, integritas dan independensi terhadap kualitas audit: etika auditor sebagai variabel pemoderasi (studi pada perwakilan BPKP provinsi riau).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharti,dkk (2017) yaitu pada penambahan variabel *time budget pressure*. Kemudian, perbedaan dari penelitian terdahulu adalah pada objek penelitian. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah BPKP Se- Jawa. Perluasan jumlah responden lebih banyak dari penelitian terdahulu dengan tujuan informasi yang diperoleh dapat lebih mewakili auditor yang ada di BPKP Se-Jawa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengalaman Kerja, Profesionalisme, Integritas, Independensi, dan *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada BPKP Se-Jawa)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang terbaik serta untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : pengaruh dari variabel pengalaman kerja, profesionalisme, integritas, independensi dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan di BPKP Se-Jawa dan responden dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja di kantor BPKP Se-Jawa.

1.3 Rumusan Masalah

Hasil pemeriksaan yang mempunyai kualitas baik diharapkan mampu memberikan jaminan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparansi dan

bertanggung jawab. Namun, kasus mengenai kualitas audit Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akibat adanya audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait bantuan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kasus pengadaan buku SD, SMP, dan SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2004 dan 2005. Hal ini menimbulkan gugatan atas kualitas hasil audit terjadi di perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian dapat dirumuskan bahwa pengalaman kerja, profesionalisme, integritas, independensi auditor dan *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian etika auditor sebagai variabel pemoderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen pada BPKP Se-Jawa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan diatas, kaitan penelitian ini dengan teori atribusi oleh Heider (1958) yang mengungkapkan tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengalaman kerja. Kemudian untuk menguji profesionalisme auditor yang mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menguji integritas auditor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi auditor dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel pemoderasi pada BPKP Se-Jawa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan secara penulis, ilmu pengetahuan, lingkungan pemerintahan BPKP. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai kelulusan studi strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Program Akuntansi Universitas Muria Kudus. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan sebagai sarana untuk mengetahui secara lebih luas tentang teori atau praktek sehingga dapat memperluas pandangan peneliti terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Akademi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu hasil penelitian Universitas Muria Kudus. Memetakan antara mahasiswa yang pemahannya lebih bagus dengan pemahannya yang kurang dan memberikan dasar keputusan untuk lebih meneliti lagi terhadap kualitas audit.

3. Bagi Lingkungan BPKP

Untuk mempertimbangkan faktor yang ada dalam diri auditor BPKP terhadap kualitas audit dan mendorong auditor untuk lebih meneliti, memperjelas laporan kualitas audit guna membenarkan atau memperjelas kualitas audit.

